

Keempat, penaksiran karatase emas pembiayaan *qard* beragun emas ditentukan oleh Bank BRI Syariah yang disajikan dihalaman 58 pada bab tiga.

Kelima, maksimum pembiayaan maksimal 90 % dari nilai taksiran dan jangka waktu pembiayaan *qard* beragun emas 120 hari.

Keenam, pembiayaan *qard* beragun emas BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo membebankan dua biaya kepada nasabahnya, yakni biaya administrasi dan biaya sewa yang perinciannya disajikan dihalaman 57 bab tiga.

Ketujuh, pembiayaan *qard* beragun emas ini diberikan dengan pinjam meminjam dengan akad *qard*, penyerahan agunan emas dengan akad *rahn* dan terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dengan akad *ijarāh*.

Kedelapan, nasabah mendapatkan Surat Gadai Syariah (SGS) dari petugas Bank BRI Syariah sebagai bukti gadai.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Qard* Beragun Emas di Bank BRISyariah KC Sidoarjo.

Berkenaan dengan praktik *qard* beragun emas yang sudah disajikan diatas, akan dikaitkan dengan norma Hukum Islam. Dalam praktik aplikasi *qard* beragun emas, jika dikaitkan dalam norma hukum Islam, maka hal ini akan melibatkan setidaknya tiga akad dalam norma hukum Islam. Pertama akad *al qard*. Karena adanya pinjam meminjam antara pihak Bank BRI Syariah dan nasabannya. Kedua akad *rahn*. Karena adanya penyerahan emas yang di jadikan jaminan.

Prinsip dalam Bank BRI Syariah adalah bahwa *rahn* hanya berkewajiban membayar (melunasi) sesuai dengan jumlah kreditnya (utangnya), tanpa diberi tambahan apapun. Hanya saja ia harus membayar biaya penyimpanan *marhun* yang dihitung selama waktu perjanjian *qard* beragun emas berlangsung.

Berdasarkan pandangan tersebut biaya administrasi dan biaya sewa emas yang sudah ditentukan dalam Fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas pada poin tiga tidak selaras dengan hukum Islam. Karena perincian biaya-biaya yang dibebankan dari biaya administrasi dan biaya sewa tidak nyata-nyata dikeluarkan. Karena berapapun besarnya berat emas yang disimpan, biaya administrasi dan biaya sewanya akan sama.

Ketiga, berdasarkan fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada ketentuan umum poin empat “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”.⁸

Data praktik di BRI Syariah pada kasus *qard* beragun emas yang perinciannya disajikan pada bab tiga di halaman 65 yang dilakukan Laili Yuana besarnya biaya sewa kalung emas didasarkan pada nilai taksiran emas. Namun demikian jika nasabah tidak mengambil pembiayaan sebesar nilai maksimal pembiayaan *qard* maka nasabah mendapatkan potongan. Sebagaimana yang terjadi pada kasus Laili Yuana yang menggadaikan kalung emas yang ditaksir oleh petugas BRI Syariah sebesar 19 karat dan digadai dengan berat 4.5 gram Akan tetapi dari nilai maksimum pinjaman yang sebesar 1.335.584. Laili Yuana hanya membutuhkan Rp. 1.000.000 saja. Petugas BRI Syariah memberitahukan

⁸ Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Cct 4, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 25.

